



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENYELENGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA WEDELAN
DI BIDANG PEMERINTAHAN KABUPATEN JEPARA TAHUN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
ADAM MAULANA
221003742019558

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA WEDELAN DI BIDANG
PEMERINTAHAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023-2024

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ADAM MAULANA
NPM : 221003742019558

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. AGUS WIDODO, SH.MHUM
NUPTK : 0145740641130073

Anggota,

HERI PURNOMO, SH.,MHUM
NUPTK : 2148740641130093

Anggota,

DR. SRI RETNO WIDYORINI, SH., MHUM
NUPTK : 2260741642230063

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY ISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Metode Pendekatan Penelitian	50
3.2 Spesifikasai Penelitian	50
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	50

3.4	Teknik Analisis Data	51
BAB IV PEMBAHASAN		53
4.1	Dasar Hukum Pembentukan dan Legalitas Desa Wedelan	53
4.2	Struktur Organisasi dan Perangkat Desa dalam Perspektif Hukum	58
4.3	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Desa Wedelan.....	58
4.4	Identifikasi dan Analisis terhadap Potensi Maladministrasi dan Celah Hukum.....	60
4.5	Analisis Akuntabilitas dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa	72
4.6	Temuan dan Implikasi Hukum	78
4.7	Implikasi Hukum terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa	80
BAB V PENUTUP		82
5.1	Kesimpulan.....	82
5.2	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi dan Perangkat Desa.....	58

ABSTRAK

Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pemerintahan desa merupakan wujud otonomi desa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, desa sering menghadapi kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur, regulasi yang kompleks, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Tupoksi di Desa Wedelan, Kabupaten Jepara, tahun 2023–2024, untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan regulasi dan mengidentifikasi faktor penghambat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui ketentuan hukum yang mengatur Tupoksi pemerintahan desa, dan (2) Menganalisis penyelenggaraan Tupoksi Desa Wedelan di bidang pemerintahan selama periode 2023–2024. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparatur desa, BPD, dan tokoh masyarakat, serta studi dokumen perundang-undangan dan arsip desa. Pelaksanaan Tupoksi Desa Wedelan telah sesuai dengan kerangka hukum, terutama dalam administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan perencanaan partisipatif. Namun, ditemukan hambatan seperti keterbatasan SDM, sarana prasarana, tumpang tindih tugas, serta celah hukum dalam koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan mekanisme pengawasan. Tata kelola pemerintahan Desa Wedelan telah berjalan cukup baik, namun memerlukan penguatan kapasitas aparatur, harmonisasi regulasi internal, peningkatan transparansi keuangan, dan sinergi yang lebih efektif dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan penyelenggaraan Tupoksi yang lebih akuntabel dan berdaya guna.

Kata Kunci: Tupoksi Desa, Pemerintahan Desa, Desa Wedelan, Tata Kelola